

338.642

UPH

5 21



LAPORAN AKHIR

**STUDI PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT
KELAYAKAN USAHA
DALAM RANGKA MENDORONG
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
DI DAERAH PANTURA JAWA TENGAH**

OLEH: AD UPHADI

DIBAYAR OLEH DANA DIK RUTIN
UNIVERSITAS DIPONEGORO, SESUAI SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN, TANGGAL 10 APRIL 2000
NOMOR: 121/JO7.PA.I/KP/2000

LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN DIK RUTIN UNIVERSITAS DIPONEGORO

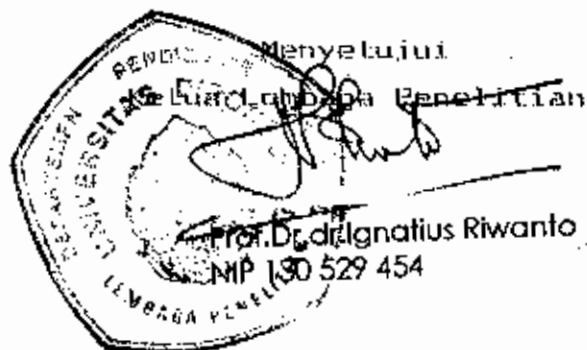
1. a. Judul : Studi Pelaksanaan Penyajian Kredit
Kelayakan Usaha Dalam Rangka Mendorong
Industri Kecil Dan Menengah Di Daerah
Pantura Jawa Tengah
- b. Kategori : I/II/III
2. Kelua Peneliti:
 - a. Nama : Drs AD Uphadi, MS
 - b. Jenis kelamin : laki-laki
 - c. Gol/NIP : IIIIC/ 131696206
 - d. Jab.fungs. : Lektor
 - e. Fak/Jurs : Ekonomi/IESP
 - f. Bidang ilmu : Ekonomi
3. Jumlah peneliti : 3 orang
4. Lokasi penelitian: Jawa Tengah
5. Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan, mulai dari April sampai
dengan Oktober 2000
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)

Semarang, 3/10/2000

Ketua Peneliti,



Drs. AD. Uphadi, MS
NIP. 131696206



RINGKASAN

Tujuan yang ingin diraih dalam penelitian ini meliputi:

(1) Melacak industri kecil dalam kegiatan ekspor Indonesia dan memutar peta sub sektor potensial dari IKM yang berorientasi ekspor. (2) Mengidentifikasi skema dan mekanisme kredit perbankan yang sudah dilaksanakan perbankan untuk IKM yang berorientasi ekspor. (3) Mengidentifikasi skema dan mekanisme pembiayaan yang dipergunakan oleh IKM yang berorientasi ekspor. (4) Menyusun rekomendasi kebijaksanaan bagi perbankan dalam mendorong pengembangan industri yang berorientasi ekspor.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam Memperkirakan bentuk atau formulasi mekanisme penyediaan kredit yang efektif dan efisien bagi industri kecil dan menengah khususnya yang berorientasi ekspor.

Metode penelitian di sini mencakup alat analisis, data dan tahap kerja.

Alat analisis yang dipakai merupakan analisis deskriptif, dengan menggunakan data sekunder yang diterbitkan oleh BPS, instansi terkait, dengan skope wilayah Jawa Tengah untuk daerah tertentu.

Data yang diambil berkisar tahun 1995-1999, dengan fokus industri kecil yang berorientasi ekspor. Data lapangan yang terkumpul kemudian dilakukan analisis dengan menggabungkannya dengan analisis kuantitatif dan kualitatif. Berbagai bentuk pertanyaan pada 'key person' menjadi pelengkap yang sangat berarti.

Analisis kuantitatif yang dipakai merupakan analisis yang sederhana, meliputi tren, prosentase, kontribusi. Sedangkan analisis kualitatif lebih memberi bobot atas hasil analisis kuantitatif.

Perbandingan data-data dengan Jawa Timur sengaja ditampilkan, dengan mengambil pertimbangan Jawa Timur selain sebagai provinsi terdahulu, juga memiliki industri kecil yang berpotensi menjadi pesaing ketat dengan Jawa Tengah. Tentu saja, data yang sifatnya nasional juga ditampilkan untuk melihat posisi Jawa Tengah di tingkat nasional.

Sebagai temuan penting penelitian ini diantaranya:

Sebagian besar pengusaha kecil dalam menjalankan usahanya masih menggunakan modal sendiri. Walaupun ada yang mengambil kredit perbankan, maka jenis agunan yang diserahkan berupa surat kondaraan, dan sertifikat tanah.

Rendahnya animo pengusaha untuk menggunakan institusi perbankan dalam menambah modal usaha adalah adanya proses pencairan kredit yang relatif bertalu lama. Namun demikian, sesungguhnya masalah juga ada pada pengusaha, berupa masih banyaknya pengusaha yang belum memiliki ijin usaha, NPWP, dan ketidaktahuan prosedur pengajuan kredit perbankan, bahkan tidak sedikit yang belum dapat menyusun studi kelayakan usaha, dan sebab-sebab lain.

Berbagai faktor menyebabkan pengusaha kecil kesulitan memperoleh kredit adalah kesalahan manajemen, faktor-faktor eksternal yang tak terkontrol, aspek pemasaran dan kesulitan bahan baku.

Kemampuan industri kecil terhadap industri manufaktur baik dari segi unit usaha, tenaga kerja dan nilai tambah masih sangat

kecil, namun masih dapat ditingkatkan.

Kelemahan para pengusaha kecil adanya intensitas persaingan ketat di tingkat internasional dibanding di tingkat lokal maupun nasional.

Yang menggejalaakan, pengusaha kecil merasa mampu memanfaatkan peluang yang didapat dari lingkungan usaha. Namun sekali lagi, karena kendala modal dan teknologi, maka peluang tersebut sering terabaikan.

Beberapa saran yang dapat diajukan dari hasil penelitian ini adalah:

Pertama dibangun proyek percontohan implementasi skema kredit di beberapa daerah.

Perlu penyempurnaan dalam hal penyaluran kredit bagi IKM, khususnya berkaitan dengan penyederhanaan prosedur, keringanan agunan dan jangka waktu pengembalian kredit.

Keterlibatan LSM menjadi penting artinya untuk lebih memberdayakan IKM, yang menyangkut pemberdayaan di bidang SDM dan manajemen.

PRAKATA

Ini saya penelitian dengan judul: Studi Pelaksanaan Penyusunan Model Kelayakan Usaha dalam Rangka Mendorong Industri Kecil dan Menengah di Daerah Pantura Jawa Tengah, dapat diselesaikan.

Penelitian ini dapat terselenggara berkat bantuan: Lembaga Penelitian UNDIP, Bapak Dekan Fakultas Ekonomi UNDIP, dan berbagai instansi yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih.

Penelitian ini tentunya jauh dari sempurna, oleh karenanya segala kritik dan saran menjadi dambaan peneliti.

Semarang, 4 Oktober 2000

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	halaman
DAFTAR I. PENDAHULUAN	1
DAFTAR II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Perkembangan industri kecil dan menengah nasional.....	9
2.2. Persepek IKM berpeluang ekspor.....	9
2.3. Teknologi kulit dan produksi kulit.....	10
DAFTAR III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	14
3.1. Tujuan penelitian.....	14
3.2. Manfaat penelitian.....	14
DAFTAR IV. METODE PENELITIAN.....	15
DAFTAR V. GAMBAR DAN KEPENDAHULUAN.....	16
5.1. Aksesibilitas IKM terhadap KUK.....	16
5.2. Potensi IKM.....	30
5.3. Mekanisme pembiayaan.....	30
5.4. Prioritas pengembangan IKM.....	34
DAFTAR VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
6.1. Kesimpulan	57
6.2. Saran.....	61

Daftar Tabel.

TABEL.	halaman:
2.1. Laporan kuliah samak Indonesia periode Maret - Mei 1999.....	17
2.2. Laporan kuliah samak Indonesia periode Juni - Mei 1999.....	18
5.1. Perkembangan dan proporsi KUK terhadap total kredit.....	16
5.2. Penyaluran KUK berdasarkan daerah.....	17
5.3. Kesulitan dalam penyaluran KUK.....	18
5.4. Aspek modal pengusaha kecil.....	19
5.5. Banyaknya kredit yang diterima dari Bank.....	20
5.6. Biaya penyaluran kredit.....	21
5.7. Agunan yang diberikan.....	21
5.8. Tingkat kesulitan mendapat kredit.....	22
5.9. Waktu proses kredit terlama.....	23
5.10. Sebab-sebab kegagalan memperoleh KUK menurut Bank.....	24
5.11. Manfaat kredit bagi usaha.....	25
5.12. Presentase keberhasilan pemanfaatan kredit....	25
5.13. Perkembangan usaha penerima KUK menurut Bank.....	26
5.14. Kesulitan dalam pengembalian kredit.....	26
5.15. Presentase kemacetan KUK di Bank.....	27
5.16. Sebab-sebab kesulitan dalam pengembalian kredit.....	27
5.17. Sebab kemacetan KUK menurut Bank.....	28
5.18. Tanggapan terhadap peluncuran KUK.....	29
5.19. Kontribusi industri kecil terhadap industri manufaktur.....	30

STUDI PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT KELAYAKAN USAHA
DALAM RANGKA MENDORONG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
DI DAERAH PANTURA JAWA TENGAH

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1.1. GBHN 1993 maupun GBHN sesudahnya memberikan arahan, bahwa perhatian perlu diarahkan kepada usaha untuk membina dan melindungi usaha kecil dan tradisional serta golongan ekonomi lemah pada umumnya.

1.1.2. Pencapaian sasaran pembangunan, khususnya dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi diupayakan melalui pelaksanaan berbagai program dan kebijakan pemerintah, baik yang bersifat makro maupun mikro. Kebijakan makro antara lain melalui kebijakan kredit diharapkan akan mampu memelihara kestabilan ekonomi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja baru. Sedangkan melalui kebijakan mikro antara lain dapat meningkatkan dan memperluas akses usaha kecil dan koperasi kepada lembaga keuangan/perbankan, akses pasar, berupa pengenalan, pembinaan produk-produk baru yang lebih mendekati selera pasar, atau kegiatan-kegiatan lain yang bersifat produktif dari usaha yang bersangkutan.

UPT-POKTAZ-1991

1.1.3. Dalam rangka pengembangan sektor-sektor tertentu termasuk usaha kecil dan koperasi, pada awal pembangunan

pemerintah Indonesia mengembangkan kebijakan " Subsidized selective Credit Policy" , yaitu berbagai pola kredit bersubsidi dengan bantuan kredit likuiditas Bank Indonesia. Pola kredit bersubsidi yang telah diluncurkan pemerintah sejak 1973 antara lain : kredit investasi kecil (KIK) dan kredit modal kerja permanen (KMKP), kredit bimas dan imas, kredit kepada koperasi, kredit profesi guru (KPG) , kredit umum pedesaan, dan sebagainya. Semua kebijakan tersebut telah membawa dampak positif pada perluasan kesempatan kerja.

1.1.4. Dalam rangka membentuk pengembangan usaha kecil dan usaha informal, yang sekaligus juga merupakan upaya pemerataan kesempatan berusaha dan pendapatan Bank Indonesia (BI) selain memberikan bantuan keuangan, juga memberikan bantuan teknis kepada perbankan melalui Proyek Pengembangan Usaha Kecil (PPUK). Salah satu tugas PPUK-BI adalah melakukan identifikasi peluang investasi pada semua sektor ekonomi. Untuk pelaksanaannya, diutamakan usaha-usaha yang langsung memberikan dampak peningkatan kesempatan kerja, produktivitas dan pendapatan. Disamping itu, prioritas juga ditekankan kepada usaha-usaha yang memanfaatkan bahan baku lokal, menunjang penerimaan devisa serta yang memproduksi barang substitusi import.

1.1.5. Perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang mendesak. Munculnya pengangguran karena laju pertumbuhan

kesempatan kerja tidak dapat mengesjar laju pertumbuhan angkatan kerja. Masalah kesempatan kerja mengandung makna pengurangan pengangguran dan peningkatan produktivitas kerja. Oleh karena itu perlu lebih dimantapkan dan ditingkatkan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu untuk mendorong kesempatan kerja, baik yang bersifat umum, sektoral, regional maupun langkah-langkah yang bersifat khusus. Langkah-langkah yang bersifat umum meliputi kebijakan fiskal, moneter, upah dan sebagainya. Sedangkan yang bersifat sektoral antara lain peningkatan pendidikan yang dapat menciptakan lapangan kerja, pembangunan, pertanian, industri, perhubungan, pariwisata dan perdagangan, penentuan skala prioritas investasi serta pemilihan teknologi yang tepat guna. Langkah-langkah yang bersifat khusus meliputi program bantuan pembangunan, proyek-proyek padat karya dan lain-lain.

1.1.6. Pemerintah sangat menaruh harapan pada sektor industri sebagai katup pengaman untuk menampung angkatan kerja baru. Namun sektor industri yang memberikan kontribusi besar bagi penyerapan tenaga kerja ada pada industri menengah dan kecil. Kendala yang sering dihadapi pengusaha kecil dan menengah :

1. Bakat kewiraswataan dan manajemen
2. Permodalan
3. Pemasaran
4. Teknik produksi dan Teknik kejuruan

1.1.7. Berbagai dampak positif dari keberadaan kredit yang bersubsidi juga menimbulkan dampak negatif khususnya dalam jangka panjang, antara lain kredit tersebut menyebabkan timbulnya inefisiensi, kurang mendorong lembaga keuangan dalam pengalihan dana masyarakat, menimbulkan tekanan inflasi dan distorsi alokasi dana. Berkaitan dengan kondisi tersebut, pemerintah pada bulan Januari 1990 mengeluarkan deregulasi dalam penyempurnaan sistem pengkreditan yang dikenal sebagai paket 20 Januari 1990 (PAKJAN 1990). Hal positif dari adanya PAKJAN 1990 adalah hingga Oktober 1994, penyaluran KUK bernilai Rp. 33 triliun dibandingkan Rp 14 triliun pada akhir tahun 1990. Meskipun secara nasional penyaluran KUK dapat melampaui target 20% , tetapi masih dapat keluhan perbankan khususnya yang selama ini familiar dengan " Corporate Banking" dalam menyalurkan KUK karena sulitnya mencari usaha kecil yang layak secara teknis perbankan, resiko yang tinggi , dan biaya transaksi yang tinggi. Disisi lain usaha kecil masih memiliki hambatan untuk memperoleh kredit dari perbankan karena tidak mampu menyediakan jaminan dan persyaratan lain yang ditetapkan perbankan, disamping adanya pengaruh kebijakan uang ketat (tight money policy) .

1.1.8. Dalam rangka pencapaian sasaran pemerataan diperlukan program penyediaan kredit bagi usaha kecil yang produktif dengan mantap serta didukung dan dilakukan secara

lebih luas oleh semua bank, maka pemerintah meluncurkan paket kebijakan 29 Mei 1993 (PAK MEI 1993), yang merupakan penyempurnaan dari PAKJAN 1990. Perlu dicatat disini bahwa dibandingkan dengan PAKJAN 1990, PAKMEI 1993 memberikan beberapa keringanan (fleksibilitas) kepada perbankan dalam penyaluran 20 % dari portfolio kreditnya kepada usaha kecil. Pada PAKJAN 1990, sektor yang diprioritaskan untuk memperoleh KUK adalah sektor produktif (sektor industri pengolahan), tetapi PAK MEI 1993 menyebutkan bahwa KUK dapat diberikan kepada semua sektor. Disamping itu kepada perbankan diberikan kemudahan untuk melakukan pembelian SBPU KUK untuk memenuhi target 20% penyaluran KUK dan kredit yang diberikan ke sektor perumahan (properti) dihitung sebagai KUK.

1.1.9. Menukai PJPIT, ditingkat internasional terjadi sejumlah perubahan mendasar dalam tata hubungan ekonomi antara negara dengan ditandatanganinya beberapa kesepakatan internasional yang terorganisir dalam AFTA, GATT, maupun APEC Hal ini berarti, proses industrialisasi Indonesia tidak dapat lagi kelulu berorientasi pada perkembangan fluktuasi domestik, tetapi justru memperhitungkan "external pressure" yang akan terjadi akibat kesepakatan - kesepakatan internasional itu. Pada masa PJP I lalu industri Indonesia tidak disiapkan untuk menghadapi persaingan global secara terbuka. Fenomena proteksi maupun lisensi yang global yang terlindung dibalik argumen "infant industries"

masih dipertahankan yang selanjutnya membentuk struktur pasar yang oligopolistik. Keadaan ini lebih diperburuk lagi dengan tendensi proteksi dan lisensi yang memihak kepada industri besar, sehingga secara otomatis industri menengah, kecil dan rumah tangga relatif kurang diperhatikan. Padahal, secara potensial dan aktual industri kecil dan rumah tangga cukup dapat dirasakan perannya apalagi jika dikaitkan dengan persoalan absorsi angkatan kerja sekitar 2,4 juta setahun yang dihadapi Indonesia.

1.1.10. Menghadapi liberalisasi ekonomi dan perdagangan sebagai wujud "external pressure" dan menjawab persoalan ketenagakerjaan, maka orientasi industrialisasi dimasa yang akan datang seharusnya bermuara kepada pengembangan industri kecil (IK). Permasalahannya dengan adanya kebijaksanaan pemerintah yang mengharuskan perbankan menyalurkan kreditnya kepada usaha kecil, menjadi pertanyaan adalah tindakan penyesuaian (adjustment) yang seperti apa baik dalam bentuk pengembangan produk (produk development) maupun dalam sistem penyaluran kredit yang seharusnya dilakukan perbankan nasional agar ekspor produk industri kecil dapat didorong perkembangannya.

1.1.11. Implikasi dari penelitiannya ini adalah mencoba mengantisipasi berbagai kelemahan, kebutuhan baru dan bentuk layanan finansial yang seharusnya diberikan perbankan sebagai langkah antisipasi dalam pengembangan industri

kecil pasca GATT/WTO dan APEC.

1.1.12. Salah satu permasalahan industri kecil berorientasi ekspor adalah masalah finansial untuk membiayai produksi agar kualitas produk yang dihasilkan dan waktu pengiriman produk, sesuai dengan keinginan pembeli (buyer). Jika pesanan (order) datang dengan tiba-tiba dalam jangka waktu pendek maka ketersediaan modal, baik yang bersumber dari dana sendiri maupun yang diperoleh dari perbankan juga tersedia dalam waktu singkat. Kebutuhan dana tersebut utamanya berkaitan dengan proses produksi khususnya diperlukan untuk bahan baku.

1.1.13. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa industri kecil yang produksinya berorientasi ke pasar domestik dan ekspor memiliki perangkat manajemen dan kinerja yang berbeda. Industri kecil yang produksinya berorientasi ekspor, ketersediaan dana yang cukup dan selalu tersedia jika diperlukan merupakan faktor yang sangat menentukan berkaitan dengan persyaratan (on time delivery) dan pemenuhan kualitas produk yang sesuai dengan kebutuhan pembeli di luar negeri. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, menjadi pertanyaan adalah sejauh mana PAKMEI 1993 yang merupakan penyempurnaan dari PAKJAN 1990 dapat mendorong ketersediaan dana sebagai sumber pembiayaan guna meningkatkan ekspor industri kecil ?

1.1.14. Hasil studi Departemen Keuangan dan PSP-IPB (1993) menunjukkan bahwa penyaluran KUK oleh perbankan (swasta nasional dan pemerintah) lebih dominan kepada sektor perdagangan dibandingkan sektor industri pengolahan. Penelitian tentang lembaga penopang industri kecil masih lemah dan industri kecil sendiri belum dapat memanfaatkan secara optimal terhadap penopang lembaga yang ada. Kesimpulannya bahwa pendalaman terhadap aspek kelembagaan finansial yang mempengaruhi kinerja dan efisiensi IKM khususnya yang mendorong produk IKM penting dilakukan. Untuk itu perlu dikaji adalah apakah penyaluran KUK perbankan PAKMEI 1993 dapat memperkuat kinerja industri kecil dan menengah dalam pasar ekspor?

1.1.15. Disamping ketersediaan dana yang tepat waktu sesuai kebutuhan industri kecil dan menengah, faktor penting lainnya dalam mendorong pengembangan IKM yang berorientasi ekspor adalah terdapatnya sistem penyaluran kredit UKM yang sesuai dengan kebutuhan IKM yang menjadi pertanyaan adalah apakah sistem penyaluran KUK oleh perbankan setelah berlalunya PAKMEI 1993 dapat kondusif terhadap perkembangan IKM yang berorientasi ekspor ? Jika tidak, sistem dan " product development" seperti apa yang harus dilakukan oleh perbankan dalam mendorong pengembangan IKM.